BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori serta menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnhya serta disamping itu peneliti terdahulu membantu penulis dalam memposisikan penelitian serta menunjukan orsinalitas dari penelitian. Berikut terdapat penelitian yang sudah dilakukan seblumnya.

1. Erdipa (2018:4), dalam peneletian yang berjudul "Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kepala Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara", Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi di Kantor Kepala Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah menerapkan dimensi Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty beserta indikatornya.
2. Igrino (2020:48), dalam peneltian dengan judul "Kualitas Pelayang Publik di Kantor keroit Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan" menunjukkan bahwa pelayanan yang ada di Desa Keroit belum sepenuhnya baik. Masyarakat telah menilai secara langsung melalui wawancara yang diberikan peneliti dan menunjukkan bahwa kinerja perangkat desa masih perlu adanya keterbukaan dan kejelasan secara umum agar supaya kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diterima dan memenuhi kebutuhan setiap anggota masyarakat.

3. Cokro (2022:229), dalam peneltian dengan judul "Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang". Menunjukkan bahwa Hasil penelitian adalah rumusan berbagai macam model implementasi kebijakan publik pemerintah desa baik di bidang pelayanan publik, bidang pembangunan infrastruktur serta bidang pemberdayaan masyarakat.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan judul penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi
1	(Erdipa 2018:4) Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat Di Kantor Kepala Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhanbatu Utara	Telah menerapkan kelima dimensi pelayanan: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy	Penelitian sekarang lebih menekankan pada implementasi kebijakan publik, bukan hanya kualitas pelayanan administratif berdasarkan dimensi pelayanan
2	(Igrino 2020:48) Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Desa Keroit Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan	Pelayanan belum optimal; perlu peningkatan keterbukaan dan kejelasan	Penelitian sekarang tidak hanya menilai persepsi masyarakat, tetapi juga mengkaji proses implementasi kebijakan sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan
3	(Cokro 2022:229) Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Dau	Menghasilkan rumusan model implementasi kebijakan di bidang pelayanan, infrastruktur,dan pemberdayaan	Hampir serupa dalam fokus, namun penelitian sekarang lebih spesifik pada peningkatan kualitas pelayanan publik di

	Kabupaten Malang		satu desa tertentu (AmpelDento) sebagai studi kasus

Sumber : (Erdipa 2018), (Igrino 2020), (Cokro 2022)

2.2 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam. Menurut Anderson kebijakan publik bukan sekadar serangkaian regulasi, tetapi juga merupakan upaya strategis pemerintah untuk memecahkan masalah sosial yang kompleks dan memenuhi kebutuhan publik melalui berbagai instrument (Guo, 2016).Termasuk regulasi, penganggaran, dan pelayanan. Proses kebijakan publik sendiri mencakup beberapa tahap yang saling terkait, yaitu perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi, di mana setiap tahap memiliki peran dan tantangannya masing-masing.

Di Indonesia, konsep kebijakan publik sering kali diuraikan oleh para ahli. Misalnya, menurut Mardiasmo (2002:45), kebijakan publik merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, dan proses ini seharusnya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Putri, seorang peneliti senior di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang menegaskan bahwa kebijakan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab

masalah sosial yang ada, sehingga partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan menjadi sangat penting(Putri, 2025:132)

Pada tahap perumusan, berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, berkontribusi dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi yang tepat. Setelah disetujui, kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan, yang sering kali melibatkan berbagai lembaga dan aparat pemerintah di tingkat lokal, termasuk pemerintah desa. Dalam konteks desa, kebijakan publik berperan penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Menurut H. Taufik, seorang praktisi pemerintahan desa, "Pentingnya kebijakan publik yang baik di desa tidak hanya terletak pada pelaksanaannya, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan" (Taufik, 2020:148).Dengan demikian, implementasi kebijakan publik yang efektif sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya.

Penting untuk dicatat bahwa evaluasi kebijakan juga merupakan bagian integral dari siklus kebijakan publik, yang memungkinkan pemerintah untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan(Rani, 2024). Dengan demikian, kebijakan publik di tingkat desa tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi

juga menciptakan dasar yang kuat bagi pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana disampaikan oleh Bappenas, “Evaluasi yang berkesinambungan terhadap kebijakan publik akan menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat” (Bappenas, 2018).

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah fase krusial di mana kebijakan yang telah dirumuskan dan disahkan mulai dilaksanakan oleh pihak yang berwenang, seperti pemerintah pusat dan daerah(Eltho, 2016). Proses ini tidak hanya melibatkan tindakan teknis, tetapi juga serangkaian interaksi kompleks antara berbagai aktor dan konteks sosial yang ada. Menurut Van Meter dan Van Horn implementasi tidak hanya bergantung pada kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tujuan kebijakan yang jelas, alokasi sumber daya yang memadai, serta karakteristik dan kapasitas pelaksana(Amma et al., 2024).Menurut James E. Anderson (1979) dalam bukunya Public Policy-Making, implementasi kebijakan merupakan tahap lanjutan dari proses perumusan kebijakan, di mana keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah diterapkan dalam tindakan nyata guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Anderson mendefinisikan implementasi sebagai “the application of policy by the government’s administrative machinery to the problems that have been defined and formulated”, yang berarti bahwa implementasi adalah penerapan kebijakan oleh perangkat

administrasi pemerintah terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan di dalam kebijakan tersebut.Lebih lanjut, Anderson menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses dinamis yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik untuk mengubah keputusan politik menjadi tindakan administratif yang nyata. Proses implementasi tidak hanya sekadar menjalankan perintah atau instruksi dari pembuat kebijakan, tetapi juga merupakan proses penyesuaian antara isi kebijakan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik di lapangan. Dengan demikian, implementasi menjadi tahap yang sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik, karena tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang baik sekalipun tidak akan memberikan hasil yang diharapkan.

Anderson mengemukakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan terdapat empat unsur utama, yaitu interpretation (penafsiran), organization (pengorganisasian), application (penerapan), dan evaluation (evaluasi).

1. Interpretation (Penafsiran), yaitu proses menafsirkan dan memahami isi kebijakan agar dapat diterapkan secara tepat oleh para pelaksana di lapangan. Dalam konteks pemerintahan desa, tahap ini mencakup bagaimana aparat desa memahami maksud dan tujuan dari peraturan desa atau kebijakan pelayanan publik yang ditetapkan.
2. Interpretation (Penafsiran), yaitu proses menafsirkan dan memahami isi kebijakan agar dapat diterapkan secara tepat oleh para pelaksana di

lapangan. Dalam konteks pemerintahan desa, tahap ini mencakup bagaimana aparat desa memahami maksud dan tujuan dari peraturan desa atau kebijakan pelayanan publik yang ditetapkan.

3. Application (Penerapan), yaitu tahap pelaksanaan kebijakan secara konkret dalam bentuk tindakan administratif atau pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Evaluation (Evaluasi), yaitu proses penilaian terhadap hasil pelaksanaan kebijakan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan telah mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi hambatan atau kekurangan yang perlu diperbaiki pada tahap berikutnya.

Menurut Anderson, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana pelaksana memahami tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, struktur birokrasi yang efektif, serta dukungan lingkungan sosial dan politik. Implementasi yang baik harus mampu menyesuaikan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan realitas sosial yang dihadapi di lapangan. Dalam konteks penelitian tentang implementasi kebijakan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan desa, teori Anderson dapat digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat bagaimana pemerintah desa menerjemahkan kebijakan pelayanan publik menjadi tindakan nyata, mulai dari tahap penafsiran kebijakan, pengorganisasian pelaksana, penerapan pelayanan kepada masyarakat, hingga tahap evaluasi hasil pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, teori Anderson memberikan kerangka yang jelas dalam memahami proses

implementasi kebijakan publik secara sistematis dan terukur di lingkungan pemerintahan desa.

Model implementasi yang mereka kembangkan menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya adalah komitmen pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut, kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses implementasi. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dapat mendorong alokasi sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk finansial maupun non- finansial, untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan, seperti pegawai negeri dan lembaga terkait, memiliki motivasi yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan yang dijalankan, maka kemungkinan keberhasilan implementasi akan meningkat.

Di sisi lain, kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sangat menentukan efektivitas implementasi. Sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Dalam konteks ini, pelatihan dan pengembangan kapasitas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksana kebijakan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mardiasmo ,Kualitas pelaksanaan kebijakan publik sangat bergantung pada seberapa baik sumber daya manusia dipersiapkan dan diberdayakan(Rohayatin et al., 2017).

Namun, implementasi kebijakan publik di Indonesia sering dihadapkan pada tantangan yang beragam. Masalah birokrasi yang lambat, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta resistensi dari masyarakat adalah beberapa hambatan yang sering muncul. Misalnya, dalam implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, banyak desa menghadapi kesulitan dalam menyusun anggaran dan merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Prof. Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi menyatakan bahwa, tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan publik adalah bukan hanya masalah teknis, tetapi juga adanya ketidakcocokan antara kebijakan yang ditetapkan dan realitas di lapangan(Pambudhi et al., 2005).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah kebijakan telah dirumuskan dengan baik, keberhasilannya sangat bergantung pada faktor-faktor kontekstual dan operasional yang ada di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar kebijakan publik dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Penelitian dan evaluasi yang berkesinambungan juga penting untuk memahami dinamika implementasi di lapangan, sehingga pembuat kebijakan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Dalam konteks ini, Ritchie (2016) berpendapat bahwa "evaluasi yang baik tidak hanya menilai hasil, tetapi juga proses implementasi yang terjadi."

2.4 Pelayanan Publik di Tingkat Desa

Pelayanan publik di tingkat desa mencakup berbagai aspek penting yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk administrasi, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pelayanan administratif meliputi pengelolaan dokumen, pendaftaran penduduk, dan pelayanan perizinan yang mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik. Dalam sektor kesehatan, desa diharapkan dapat menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, seperti puskesmas dan posyandu, untuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi fokus utama, di mana desa perlu berupaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui pengelolaan sekolah dan penyediaan sarana pendidikan yang layak.

Menurut Mardiasmo (2002:105), efektivitas dan efisiensi pelayanan publik sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, sistem informasi yang terintegrasi, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kualitas sumber daya manusia, yang mencakup kemampuan dan kompetensi aparat desa, sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan program layanan publik. Dalam konteks ini, Bambang PS Brodjonegoro, mantan Menteri Riset dan Teknologi, menyatakan, "Peningkatan kualitas aparatur desa harus menjadi prioritas, karena mereka adalah ujung tombak dalam melayani masyarakat".

Sistem informasi yang baik memungkinkan pengelolaan data dan informasi yang cepat dan akurat, sehingga meningkatkan responsivitas

terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, di tingkat desa, pelayanan publik sering kali menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala utama yang menghambat pengembangan dan peningkatan layanan. Banyak desa yang bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga mereka memiliki fleksibilitas yang terbatas untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat.

Kurangnya kapasitas aparatur desa, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik yang optimal. Menurut Suharso Monoarfa, seorang tokoh pemerintahan, "Keterampilan dan pengetahuan aparatur desa harus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan agar mereka dapat melayani masyarakat dengan lebih baik." Rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan juga menjadi tantangan yang signifikan. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, program dan kebijakan yang diterapkan seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat.

Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah desa dan warganya, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan apatisme masyarakat terhadap program- program yang ada. Oleh karena itu, penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan agar pelayanan publik di tingkat desa dapat lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Rhenald Kasali, seorang akademisi dan praktisi bisnis,

berpendapat, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa adalah kunci untuk menciptakan program yang sesuai dan efektif".

Upaya untuk meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa memerlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk penguatan kapasitas aparatur desa, peningkatan alokasi anggaran, dan pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan sektor swasta juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut. Dengan demikian, pelayanan publik di tingkat desa dapat berfungsi dengan baik dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah suatu proses yang kompleks dan dinamis yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat dibedakan menjadi faktor pendukung dan penghambat. Menurut Goggin et al. (1990: 236), faktor pendukung mencakup dukungan politik, alokasi sumber daya yang memadai, dan partisipasi masyarakat, yang semuanya.

Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.

1. Pemerintahan Dukungan Politik: Dukungan politik dari pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, legislatif, dan partai politik menjadi faktor krusial. Tanpa adanya dukungan politik yang kuat, kebijakan yang telah dirumuskan mungkin tidak mendapatkan legitimasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan yang efektif. Sebagai contoh, ketika sebuah kebijakan mendapatkan dukungan dari kepala daerah, hal ini dapat meningkatkan komitmen dan motivasi aparatur

desa dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Mardiasmo (2002:107), "Dukungan politik yang solid adalah fondasi bagi setiap keberhasilan implementasi kebijakan, karena hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program- program pemerintah".

2. Alokasi Sumber Daya yang Memadai: Alokasi sumber daya, baik finansial, material, maupun manusia, menjadi hal yang sangat penting. Sumber daya yang cukup akan memungkinkan pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Ketika anggaran yang dialokasikan mencukupi, program-program yang direncanakan dapat dilaksanakan tanpa banyak kendala. Hal ini diungkapkan oleh Suharso Monoarfa yang menyatakan, "Tanpa anggaran yang memadai, setiap kebijakan hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata".
3. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan sangatlah penting. Ketika masyarakat terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, mereka akan merasa memiliki kebijakan tersebut dan berkontribusi untuk keberhasilannya. Menurut Rhenald Kasali, "Keterlibatan masyarakat tidak hanya memberikan legitimasi pada kebijakan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut selaras dengan kebutuhan nyata masyarakat."

Namun, dalam proses implementasi kebijakan juga terdapat berbagai faktor penghambat yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan:

1. Resistensi dari Aparatur Pemerintah: Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari aparatur pemerintah. Pegawai yang merasa terancam oleh perubahan kebijakan baru cenderung menolak atau tidak melaksanakan kebijakan tersebut secara optimal. Sebagaimana diungkapkan oleh Sihombing (2016:287), "Kendala terbesar dalam implementasi kebijakan seringkali datang dari dalam organisasi itu sendiri, di mana perubahan sering dianggap sebagai ancaman daripada peluang".
2. Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran juga menjadi penghambat yang signifikan. Banyak desa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat atau daerah, dan hal ini sering kali tidak cukup untuk mendukung semua program yang direncanakan. Tanpa dukungan finansial yang memadai, pelaksanaan kebijakan dapat terhambat, yang berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan. Mardiasmo (2002:109) menekankan bahwa "Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan di tingkat desa sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang ada digunakan secara efisien".
3. Rendahnya Tingkat Pemahaman Masyarakat: Selain itu, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang kebijakan yang diterapkan menjadi faktor penghambat yang signifikan. Jika masyarakat tidak memahami tujuan, manfaat, atau mekanisme kebijakan, mereka cenderung apatis atau bahkan menolak kebijakan tersebut. Hal ini

dapat diatasi melalui pendidikan dan sosialisasi yang intensif. Surya (2018:76) menegaskan bahwa "Pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya menerima, tetapi juga mendukung kebijakan yang diimplementasikan".

4. Kendala Kultural dan Sosial: Selain faktor-faktor tersebut, kendala kultural dan sosial juga bisa menjadi penghambat implementasi kebijakan. Misalnya, perbedaan budaya dan tradisi di dalam masyarakat dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks lokal agar kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik.

Secara keseluruhan, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan publik sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi faktor penghambat serta memperkuat faktor pendukung, pemerintah dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat..

2.6 Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting dalam implementasi kebijakan publik, karena dapat berkontribusi pada legitimasi dan keberhasilan suatu kebijakan. Menurut Arnstein (1969:217), partisipasi masyarakat dapat

dilihat sebagai tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan kebijakan. Ia mengembangkan"Ladder of Citizen Participation," yang menggambarkan berbagai tingkatan partisipasi, mulai dari manipulasi dan pemekatan informasi hingga tingkat yang paling tinggi yaitu kontrol penuh oleh masyarakat. Tingkat partisipasi yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

1. Konsep Tingkatan Partisipasi: Arnstein mengategorikan partisipasi menjadi delapan tingkat yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori besar: non-partisipasi, partisipasi yang ditentukan, dan partisipasi yang benar. Dalam kategori non-partisipasi, tingkat yang paling rendah adalah manipulasi, di mana masyarakat hanya diperlakukan sebagai objek dan tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, dalam kategori partisipasi yang ditentukan, masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan pengambil kebijakan. Kategori terakhir, yaitu partisipasi yang benar, memberikan masyarakat kontrol penuh dan kemampuan untuk mempengaruhi hasil kebijakan secara nyata. Tingkatan partisipasi ini menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
2. Relevansi dengan Konteks Lokal: Dalam konteks desa, partisipasi masyarakat menjadi sangat krusial karena kebijakan yang diimplementasikan harus mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal.

Menurut Patunru (2014:158), "Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat desa tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan yang dihasilkan." Dalam situasi di mana masyarakat terlibat secara aktif, ada kemungkinan lebih besar bahwa kebijakan yang dihasilkan akan sesuai dengan kebutuhan lokal dan mendapatkan dukungan masyarakat. Hal ini sangat relevan dalam pengembangan desa yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat.

3. Dampak Positif Partisipasi: Studi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang aktif dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan konteks lokal. Penelitian oleh Fung dan Wright (2001:8) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Keterlibatan masyarakat juga dapat mempercepat pengidentifikasian masalah dan solusi yang lebih relevan, karena masyarakat memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung mengenai isu-isu yang mereka hadapi. Di desa Ampeldento, misalnya, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan infrastruktur,mereka dapat memberikan masukan yang lebih tepat mengenai kebutuhan riil di lapangan.
4. Tantangan dalam Partisipasi: Namun, implementasi partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Berbagai tantangan seperti

rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya informasi tentang kebijakan, dan resistensi dari aparat pemerintah dapat menghambat partisipasi yang efektif. Menurut Rachman (2017:7), "Salah satu tantangan terbesar dalam mendorong partisipasi masyarakat adalah memastikan bahwa semua suara, terutama dari kelompok marginal, didengar dan dipertimbangkan." Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang inklusif dan transparan dalam proses pengambilan keputusan, agar semua elemen masyarakat dapat berkontribusi secara aktif.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, beberapa strategi dapat diterapkan, antara lain:

1. Edukasi dan Penyuluhan: Memberikan pendidikan tentang kebijakan publik dan cara berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Penyuluhan yang dilakukan secara berkala dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat.
2. Penggunaan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile atau platform online, untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan dan berpartisipasi dalam forum diskusi.
3. Membangun Kemitraan: Menggandeng organisasi masyarakat sipil dan lembaga non-pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan.
4. Mendorong Forum Diskusi: Mengadakan forum atau pertemuan rutin di desa untuk membahas kebijakan yang akan diterapkan dan mendapatkan masukan dari masyarakat. Ini juga bisa menjadi ajang bagi masyarakat

untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.

5. Pemberian Insentif: Menyediakan insentif bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam program-program pembangunan desa, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk terlibat lebih lanjut.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini, diharapkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, khususnya di tingkat desa, dapat meningkat dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.